

MASYARAKAT DAYAK, PERUSAHAAN HPH DAN HUTAN DI KALIMANTAN BARAT

Oleh

Pujo Semedi^{)}*

Makalah ini membahas pola perubahan lingkungan di Kalimantan Barat berkenaan dengan aktivitas perladangan dan HPH, serta hubungan yang muncul di antara masyarakat Dayak yang melakukan perladangan dengan perusahaan HPH. Hubungan antara dua kelompok sosial itu mutlak tidak terhindarkan, justru karena kehadiran kedua sistem pemanfaatan lingkungan tersebut memerlukan satu sumberdaya yang sama, hutan. Kesamaan obyek eksploitasi ini pula yang pada gilirannya memunculkan pandangan-pandangan yang cenderung buruk, terutama di kalangan pengelolaan HPH terhadap para peladang. Misalnya, di kalangan staf HPH ada anggapan bahwa para peladang adalah perusak hutan, dus "musuh orang kehutanan".

A. PEMAKAIAN TANAH TRADISIONAL DI KALIMANTAN

Secara tradisional, masyarakat Dayak membedakan tanah dalam dua bentuk, yaitu tanah adat dan tanah perwalian (Kay, 1988). Tanah adat adalah tanah yang secara eksklusif merupakan milik pribadi warga suatu kampung. Kepemilikan ini diakui keabsahannya oleh masyarakat lokal, pada tingkat kampung maupun suku. Secara fisik, tanah adat -selain perkampungan- adalah hutan yang pernah dan sedang dibuka sebagai ladang. Pernah dibuka di sini tidak terbatas jangka waktunya, selama masih ada orang yang ingat dan masih terdapat tanda suatu hutan pernah dibuka, misalnya terdapat pohon buah-buahan yang sengaja ditanam, maka tanah tersebut merupakan tanah adat. Pemilikan tanah adat terjadi ketika seseorang membuka suatu bidang hutan primer untuk dijadikan ladang. Kepemilikan ini dapat diwariskan. Apabila ada keluarga lain yang ingin membuka ladang pada hutan yang sudah pernah dibuka, maka keluarga tersebut wajib meminta ijin kepada keluarga yang pertama membuka hutan tersebut atau ahli warisnya. Pada beberapa suku, permintaan ijin ini disertai dengan pemberian uang ganti, yang sering disebut pengganti mata beliung.

Di luar tanah adat terdapat tanah perwalian yaitu hutan primer, yang belum pernah dibuka untuk ladang, yang terdapat di sekitar kampung. Hutan

^{*)} Staf Pengajar Jurusan Antropologi Fakultas Sastra UGM.

ini menurut adat Dayak berada di bawah pengawasan atau perwalian kampung yang terdekat. Setiap orang yang akan membuka hutan tersebut untuk ladang harus memberitahu "wali" hutan tersebut yang kemudian diikuti dengan pesta adat memberi sesaji kepada roh penunggu hutan tersebut. Hutan perwalian ini merupakan lahan cadangan masyarakat Dayak untuk mendapatkan ladang baru ketika tanah adat mereka sudah terlalu sempit atau pun kurang subur.

Sejak diundangkannya UUPA no. 5 tahun 1960, status tanah perwalian secara yuridis berubah menjadi tanah negara, sedang tanah adat menjadi kurang jelas statusnya. Undang-undang tersebut pada dasarnya sejalan dengan tanah adat, mengingat pada hakekatnya tanah adat adalah tanah pribadi- bukan tanah komunal. Pada mulanya perubahan hukum penguasaan tanah ini tidak banyak berarti bagi rakyat Kalimantan Barat, karena memang tidak ada satu implikasi praktis apa pun yang timbul dari undang-undang tersebut. Para petani tetap membuka ladang di atas tanah adat seperti sediakala, dan membuka ladang baru di tanah perwalian--hutan primer--bila tanah adat dirasa kurang subur.

Baru pada akhir tahun 70an rakyat Kalimantan Barat merasakan apa arti Undang-undang Agraria bagi mereka, bahwa dengan adanya undang-undang tersebut orang-orang asing yang tidak mereka kenal secara hukum boleh mengacak-acak tanah perwalian mereka, menebang hutan untuk diambil kayunya dan membongkar hutan untuk diubah jadi perkebunan. Semua dilakukan nyaris tanpa permissi, tanpa menghiraukan adat. Beberapa pendatang bermodal dari kota itu bahkan ada yang berusaha mendapatkan tanah adat dengan harga murah.

Pada kondisi inilah secara langsung UUPA no. 5 1960 mempengaruhi pola pemakaian lahan di kalangan masyarakat Dayak. Ketika tanah perwalian berubah menjadi tanah negara dan diserahkan pemanfaatannya kepada pengusaha-pengusaha besar dari kota maka orang Dayak kehilangan lahan cadangan mereka untuk membuka ladang baru. Sebagai akibatnya pemanfaatan tanah adat menjadi kian intensif. Gejala ini maka terasa terutama di daerah-daerah yang dapat penduduk ataupun padat usaha.

B. TANAH ADAT DAN PERLADANGAN

Masyarakat Dayak umumnya tinggal di kampung-kampung tribal, kampung yang penghuninya masih terikat dalam hubungan kekerabatan baik akibat keturunan, perkawinan maupun kekerabatan fiktif--mengaku keturunan satu leluhur yang sama. Kampung Dayak biasanya terletak di tepi sungai besar, atau anak-anak sungainya. Hal ini terjadi karena sungai merupakan sarana transportasi yang paling mudah di Kalimantan Barat.

Karakteristik berikutnya dari masyarakat Dayak adalah sistem pertanian ladang.¹

Walaupun luasnya belum diketahui dengan jelas, perladangan merupakan mode pemakaian lahan yang dominan di pedesaan Kalimantan Barat. Ketidakjelasan ini sedikitnya berpangkal dari dua masalah. Pertama, secara politis ladang adalah praktek pertanian yang haram di Indonesia,² wajar karenanya bila pemerintah daerah berlomba menutupi atau memperkecil angka luas ladang di daerah masing-masing. Kedua, secara teknis ladang memang sukar diukur, didata, untuk kepentingan agraria karena problem definisi-apakah ladang itu bidang tanah yang sedang digarap oleh peladangnya pada satu tahun tertentu, ataukah keseluruhan tanah adat satu kampung yang sudah pernah, sedang, dan akan digarap? Bila ladang adalah bidang tanah yang sedang digarap, maka hasil pengukuran ini akan tidak berguna karena pada tahun berikutnya tanah yang telah diukur tadi sudah tidak digarap lagi. Bila ladang adalah keseluruhan tanah adat, tanah ulayat satu kampung, maka dalam definisi tata guna lahan sebagian besar tanah tersebut masuk dalam klasifikasi hutan, karena memang eksis dalam bentuk hutan dan tidak sebagai tanah pertanian. Walhasil, berapa luas ladang di Kalimantan Barat dan di Indonesia sampai hari ini tetaplah tidak jelas.³

Walau tanpa dukungan angka yang jelas, pernyataan bahwa ladang merupakan mode pemanfaatan lahan yang dominan di Kalimantan Barat dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan dua alasan. Pertama, sebagian besar penduduk Kalimantan Barat, yang 3.148.169 jiwa itu, adalah petani dan satu-satunya mode pertanian yang lestari di daerah tersebut adalah perladangan. Kedua, berdasarkan observasi lapangan, pengamatan dari udara dan keterangan dari berbagai nara sumber, perladangan memang gejala yang meluas di Kalimantan Barat; nyaris tak ada satu bagian pun dari propinsi tersebut yang bebas dari jangkauan para peladang.

¹Perladangan sebagai kebalikan dari pertanian intensif dapat didefinisikan sebagai sistem pertanian dengan masa bera yang jauh lebih panjang daripada masa tanamnya, sedangkan pertanian intensif adalah sistem pertanian dengan masa tanam yang lebih panjang daripada masa bera. Umumnya masa bera di pertanian ladang adalah 9 tahun dan masa tanam 1 tahun (Spencer, 1977), sementara pada pertanian intensif sawah di Jawa perbandingan di muka adalah 1/2 sampai 1 bulan masa bera dengan 4 bulan masa tanam. Pembahasan yang lengkap mengenai perladangan dapat diperiksa pada Dove (1985), Spencer (1977), Kunstadter, Champman dan Sabhasri (1978).

²Pengharaman politis atas perladangan ini antara lain tercermin dari acara Laporan Khusus di TVRI, edisi 4 Agustus, 1992. Pada program tersebut disiarkan kunjungan Presiden Soeharto ke suatu daerah di Sumatra untuk audiensi dengan rakyat setempat yang diantaranya adalah bekas peladang yang telah "diinsyafkan". Dalam audiensi itu pula Presiden memberikan nasehat bahwa perladangan harus dihentikan dan para peladang harus tinggal menetap karena perladangan mengakibatkan kerusakan hutan. Pembahasan yang lebih dalam mengenai sikap Pemerintah terhadap perladangan dapat diperiksa pada Dove (1985b).

³Biro Statistik mencatat ada 10.410.550 hektar ladang di Indonesia, Departemen Transmigrasi menyebut angka 11.042.300 hektar, dan Departemen Kehutanan menyatakan angka 5.802.073 hektar (Ngo, 1992: 42).

Lokasi ladang pada umumnya tersebar dalam radius antara beberapa ratus meter sampai 10 kilometer di sekeliling kampung. Mengingat dalam perladangan tidak semua tanah dibuka dalam waktu yang sama dan orang juga cenderung membuka ladang pada lokasi yang terpisah-pisah untuk meredam efek serangan hama, maka dari udara lokasi ladang akan tampak sebagai bercak-bercak di hamparan hutan.

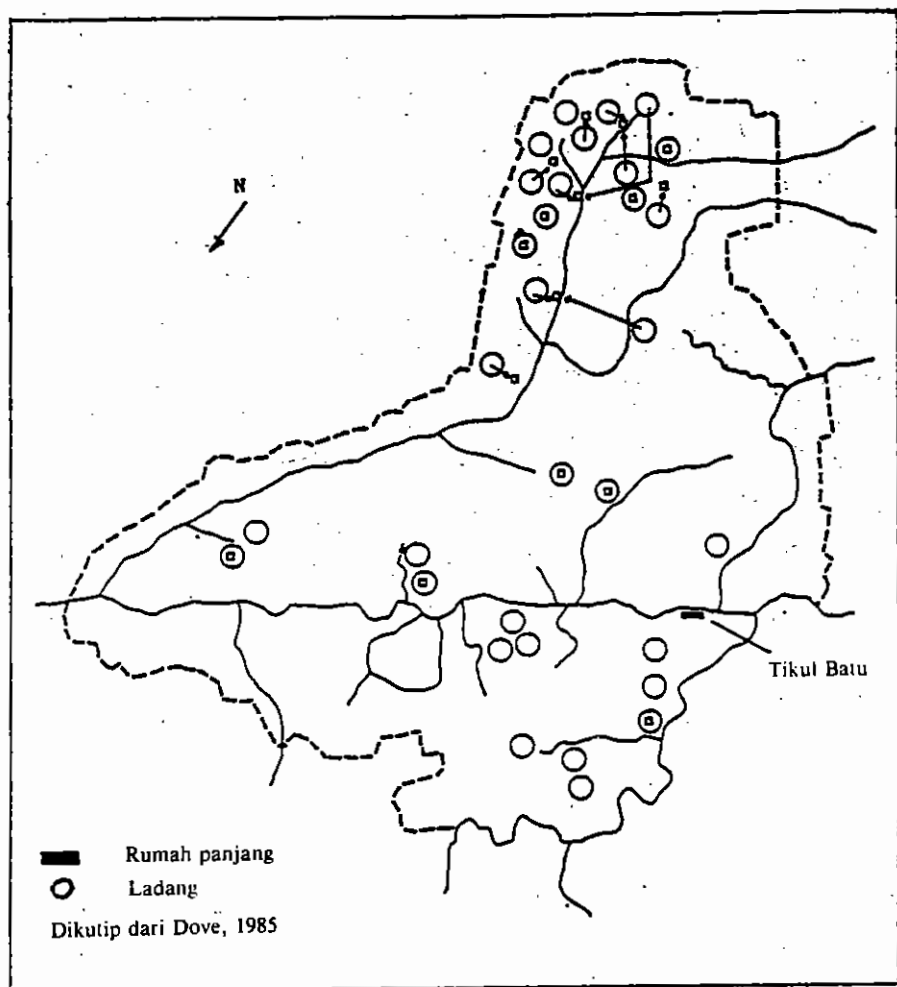
Selain berladang masyarakat Dayak menanam karet dan lada di sekitar kampung dalam kebun-kebun yang padat. Karet yang merupakan salah satu sumber uang tunai bagi para peladang ditanam dalam pola yang sama sekali tidak teratur bila dibandingkan dengan penanaman di perkebunan. Bagi para peladang karet ditanam asal tumbuh dan asal menghasilkan getah, sehingga hamparan kebun karet mereka lebih dekat ke bentuk hutan daripada kebun.⁴ Umumnya penduduk menjual karet mereka dalam bentuk karet matang, getah yang sudah dipres dan diasap. Karet matang ini selain lebih ringkas membawanya ke pasar juga memiliki nilai tambah dibandingkan dengan karet mentah.

C. AKTIVITAS PENEBAHAN HUTAN

Data mengenai luas hutan yang sudah pernah sedang, dan akan dieksploitasi--ditebang kayunya--di Kalimantan Barat sampai tulisan ini dibuat belum diperoleh. Sama halnya dengan perladangan, luas hutan yang ditebang oleh perusahaan kayu bervariasi dari tahun ke tahun dan lokasinya sendiri terus bergerak menuju arah pedalaman, semakin menjauh dari Pontianak, semakin naik ke hulu-hulu sungai. Dari keterangan beberapa nara sumber dan observasi dari darat dan udara, agaknya memang bukan kata bohong bila hutan di Kalimantan Barat sudah habis, yang ada tinggal hutan-hutan sisa yang bagi perusahaan penebangan hutan tidak lagi memiliki nilai ekonomis.

Usaha penebangan adalah sistem eksploitasi yang sangat boros hutan, jauh lebih boros dibandingkan perladangan yang selama ini selalu dituduh sebagai sumber kerusakan hutan. Memang usaha HPH tidaklah sedramatis yang dibayangkan orang sebagai pembabatan hutan sampai gundul, namun tetap saja boros hutan. Dalam melaksanakan kegiatan mengambil kayu dari hutan perusahaan-perusahaan HPH menghadapi 4 kendala yang praktis tidak memungkinkan mereka melakukan penggundulan hutan. Pertama adalah pertimbangan efisiensi biaya produksi, bahwa tidak semua jenis kayu hutan memiliki nilai ekonomis yang bila ditebang harga jualnya dapat melebihi biaya

⁴Seorang konsultan HPH menerangkan bahwa dari foto udara orang sering keliru menginterpretasikan kebun karet para peladang dengan hutan, karena kebun-kebun tersebut tampak di foto dengan diameter tajuk yang cukup besar dan kerapatan yang tinggi, serta terdistribusi secara acak--benar-benar menyerupai foto udara hutan.



Gambar 1. Pola Lokasi Ladang

produksi. Kayu-kayu yang dinilai ekonomis adalah jenis meranti (*Shorea sp*), balam (*Shorea laevifolia* Endert), kapur (*Dryobalanops sp*) keruing (*Dipterocarpus sp*), nyatoh (*Paquium sp*), dan merawan (*Hopea dryobalanoides* Mig). Faktor ekonomis ini sangat berpengaruh dalam pelaksanaan kerja perusahaan-perusahaan HPH. Bagaimanapun juga mereka adalah perusahaan yang diorientasikan untuk menghasilkan keuntungan yang sebesar-besarnya, sementara biaya eksploitasi hutan sama sekali tidak murah, sekitar Rp 73.695,00 per meter kubik. Implikasinya, agar tidak merugi mereka tidak dapat menebang sembarang pohon.

Hambatan kedua adalah peraturan Pemerintah, yang mengharuskan perusahaan menebang hanya pohon-pohon dengan garis tengah 40 cm ke atas, dan pohon-pohon tertentu yang sudah langka, kayu belian misalnya, juga tidak boleh ditebang. Dengan adanya aturan ini maka tidak semua pohon-pohon yang memiliki nilai ekonomis tertebang habis dalam satu masa penebangan. Dengan asumsi bahwa pohon-pohon hutan memiliki pertumbuhan riap sebesar 1 cm per tahun, maka diperhitungkan pada masa 20 tahun kemudian pohon-pohon yang bergaris tengah 40 cm ke bawah sudah menjadi pohon dengan garis tengah 60 cm, sehingga hutan tersebut siap dieksploitasi lagi.

Hambatan ketiga adalah masalah teknis, terutama yang terkait dengan penyeretan barang pohon dari tempat penebangan menuju tempat penampungan sementara. Di Kalimantan penyeretan batang-batang kayu biasa dilakukan dengan traktor yang ditangani oleh operator-operator handal. Akan tetapi traktor-traktor tersebut bagaimanapun handal operatornya, tidak dapat menjangkau lokasi-lokasi curam dengan tingkat kemiringan yang tinggi, dan lokasi yang struktur tanahnya sangat lembek. Akibatnya pohon-pohon yang berada di lokasi-lokasi tersebut selamat dari penebangan.

Keempat adalah hambatan lingkungan. Penyebaran pohon-pohon yang bernilai ekonomis tidaklah merata di seluruh bagian hutan. Ada lokasi yang cukup padat dengan pohon-pohon tersebut, ada pula yang sama sekali kosong. Beruntunglah hutan yang kosong dari pohon-pohon yang bernilai ekonomis, karena ia akan selamat dari terjangkan bulldoser, gilasan traktor, dan tajamnya gigi gergaji mesin.

Dengan adanya keempat faktor di atas, maka hutan tempat beroperasinya perusahaan-perusahaan kayu sukar untuk benar-benar menjadi gundul. Sisa-sisa pohon besar masih tetap saja ada dan dalam waktu satu tahun bagian yang pernah ditebang itu akan kembali rimbun seperti sediakala, cuma tidak ada pohon-pohon besar yang ekonomis lagi. Mata orang awam pun sukar untuk mengenali adanya bekas-bekas penebangan di lokasi tersebut.

Hutan sangat cepat tumbuh di Kalimantan. Dengan daya alamnya hutan yang telah ditebang dalam waktu singkat dapat "menyembuhkan luka-luka" di "kulitnya". Permukaan tanah yang selama proses penebangan berlangsung dibongkar-gusur oleh bulldoser agar jalur penyeretan kayu dapat dibuka, setelah aktifitas penyeretan selesai segera dijajari oleh tanaman-tanaman rambat. Bidang-bidang hutan yang kosong akibat kayunya ditebang ataupun sengaja dibuka untuk tempat penampungan kayu sementara begitu aktifitas berhenti segera ditumbuhi oleh tumbuhan pionir berkayu lunak. Berkat proses alami yang luar biasa inilah permukaan bumi Kalimantan Barat relatif tetap hijau, walau selama dua puluh tahun terakhir ini digempur habis-habisan oleh pengusaha HPH.

Untuk menjamin kesinambungan usaha, kelestarian rotasi penebangan, Pemerintah memperkenalkan TPTI atau Tebang Pilih Tanam Indonesia. Dengan TPTI penebangan harus dilakukan secara selektif, seperti yang telah disampaikan di muka. Selain itu, pengusaha juga harus melakukan penanaman kembali jenis-jenis pohon yang telah mereka tebang dan menjaga pohon-pohon muda yang sudah tumbuh alami dari gangguan tanaman lain. Dengan aturan ini maka diharapkan pohon-pohon yang bernilai ekonomis tidak segera berubah menjadi tanaman langka.

Ironinya, para pengusaha HPH cenderung bertindak demi keuntungan jangka pendek kelompok sendiri saja. Aturan TPTI banyak yang dilakukan serampangan, sekedar untuk memenuhi persyaratan dan contoh bila ada peninjauan. Pohon-pohon dengan garis tengah di bawah 40 cm ikut ditebang, karena memang laku dijual. Penanaman bibit pengganti dilakukan di tepi jalan-jalan besar yang mudah terlihat, sedang bagian hutan yang lebih dalam diserahkan sepenuhnya kepada alam. Perlu diingat, bahwa aktifitas penanaman kembali memerlukan biaya yang tidak sedikit, semakin banyak yang ditanam semakin banyak ongkos yang harus dikeluarkan. Walhasil yang terjadi sekarang TPTI bukan lagi Tebang Pilih Tanam Indonesia namun Tebang Pasti Tanam Insya Allah, demikian lelucon para staf perusahaan hutan di Kalimantan Barat.

Keengganan para pengusaha HPH mengikuti aturan Pemerintah juga berpangkal pada ketidakpastian konsesi HPH mereka setelah masa 20 tahun usai. Bagi mereka sama sekali tidak jelas apakah setelah kontrak yang pertama selesai areal yang sudah mereka eksploitasi dan mereka tanami itu akan kembali ke tangan mereka lagi. Dalam ketidakjelasan semacam ini maka langkah para pengusaha yang paling rasional, tentunya dari sudut pandang mereka sendiri, adalah melakukan eksploitasi sebesar mungkin dan melakukan penanaman kembali sesedikit mungkin. Lingkungan Kalimantan Barat memang tetap hijau, hijau oleh hutan yang sudah kehilangan kayu-kayunya, dan--bekas--rimba yang terhampar di sepanjang sungai Kapuas nyaris sama dengan sawah yang habis dipanen padinya. Dan pemandangan itu dengan jelas menunjukkan betapa dalam waktu kurang dari tiga puluh tahun, rimba tropis Kalimantan Barat telah berubah menjadi bekas rimba tropis, tanpa seorangpun tahu kapan rimba itu akan kembali.

D. LOKASI KERJA HPH

Lokasi kerja perusahaan HPH selalu berada di hutan primer, di tanah perwalian. Karena hanya di hutan tersebut kayu-kayu ekonomis yang layak eksploitasi terdapat. Tanah perwalian di Kalimantan Barat adalah bagaikan kue lezat, penuh gizi, yang dijadikan obyek pesta pora. Kekayaan tanah per-

walian yang utama adalah kayu hutan yang tumbuh alami selama ratusan tahun. Baru kayunya saja ternyata tanah perwalian yang berwujud hutan rimba ini berhasil mengundang kedatangan para pemodal raksasa yang segera saja menjadi maha raksasa setelah memakan kayunya. Setelah kayunya habis ditebang, tanah perwalian ternyata masih juga mengundang selera untuk dimanfaatkan sebagai tanah perkebunan dan hutan tanaman industri. Walhasil tanah perwalian memang menjadi tambang emas yang hingga kini masih terus mengalir depositnya, walaupun orang-orang yang semula merupakan walinya hanya dapat menyaksikan dari pinggir sambil menahan air liur. Dari titik ini dapat dimengerti bahwa ketika pemanfaatan hutan tropis tersebut memunculkan kontroversi, hal itu lebih bersumber dari ketimpangan penikmatan kekayaan yang dikandung hutan tropis daripada oleh perubahan status penguasaan hutannya.

Luas tanah perwalian yang setelah berlakunya UUPA no. 5 th. 1960 berubah menjadi tanah negara, sampai tulisan ini disusun belum diperoleh datanya. Bahkan mungkin angka pasti mengenai tanah negara di Kalimantan Barat tersebut memang tidak ada yang tahu. Ada berita burung yang beredar di kalangan staff perusahaan kayu dan LSM di Pontianak bahwa Pemerintah terlalu besar dalam menaksir luas tanah negara, sehingga pada penyusunan konsesi HPH akhir-akhir ini--demikian menurut berita burung tersebut-- luas hutan yang masih tersisa dengan konsesi yang diberikan lebih besar konsesinya. Pengusaha diberi konsesi 100.000 hektar, katakanlah, di lapangan yang ia dapati ternyata kurang dari jumlah tersebut. Sebagai akibatnya di antara perusahaan penebangan hutan sering terjadi pencurian kayu, karena masing-masing ingin memperoleh tambahan hasil untuk menutupi biaya konsesi yang harus mereka bayar ke Pemerintah.

Pola perubahan status penguasaan tanah perwalian secara sederhana ditampilkan pada diagram berikut.

Gambar 2. Pola Perubahan Status Penguasaan dan Pemanfaatan Tanah Perwalian

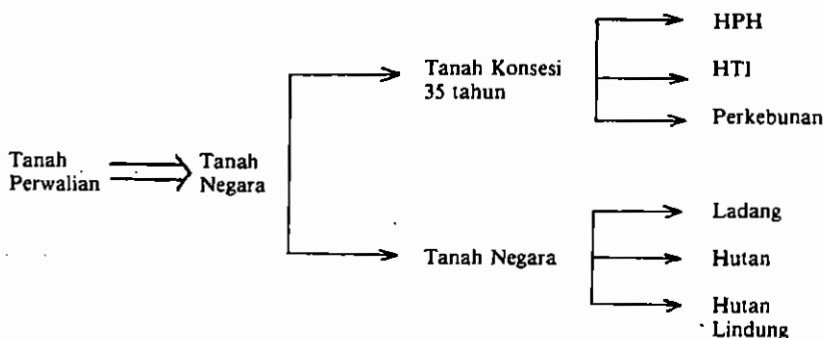


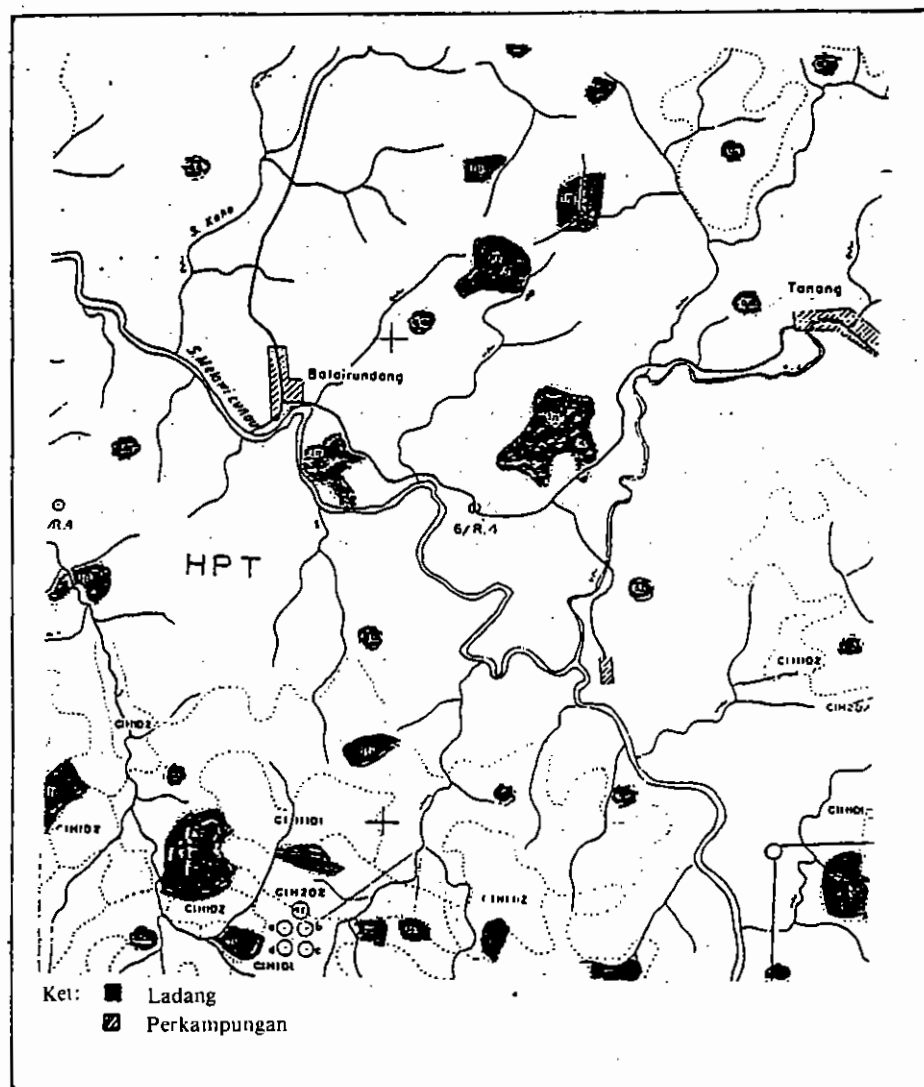
Diagram di atas menunjukkan dua fase perubahan tanah perwalian. Fase pertama, tahun 1960, tanah perwalian secara yuridis berubah menjadi tanah negara. Mulai tahun 1970an secara efektif tanah negara terbagi menjadi dua kelompok, kelompok pertama adalah tanah negara yang dikonsesikan dengan Hak Guna Usaha selama 20/25 tahun, kedua adalah tanah yang tetap menjadi tanah negara. Tanah negara yang dikonsesikan umumnya dimanfaatkan untuk eksploitasi kayu hutan, perkebunan dan HTI. Kelompok kedua umumnya adalah tanah negara yang belum dikonsesikan, tanah negara yang dijadikan ladang oleh penduduk, dan tanah negara yang dijadikan hutan lindung dan suaka margasatwa.

Pada mulanya tanah negara dikonsesikan kepada para pemegang HPH untuk dieksploitasi kayunya. Setelah eksploitasi kayu selesai, sebagian tanah konsesi dimanfaatkan untuk perkebunan dan HTI dengan konsesi baru, sedang sebagian lain dikembalikan lagi ke negara sebagai bekas hutan. Bekas hutan inilah, yang dengan metode Tebang Pilih Tanam Indonesia, diharapkan pada 40 tahun kemudian sudah dapat dieksploitasi lagi kayunya. Sejauh ini belum diperoleh data mengenai luas hutan yang sudah dieksploitasi dan dikembalikan lagi kepada negara, serta sejumlah lain yang dimanfaatkan lagi untuk perkebunan dan HTI, sedemikian pula dengan faktor-faktor yang mendorong seorang pengusaha untuk memilih suatu lokasi bekas hutan--dan bukan lokasinya lainnya--untuk dijadikan lahan bagi dua usaha tersebut.

Mengenai siapakah yang mengajukan konsesi baru di bekas lahan HPH juga belum jelas, apakah hal itu dilakukan oleh pemegang konsesi lama ataukah oleh pengusaha lain. Hanya saja pada umumnya perusahaan-perusahaan HPH yang berpangkal di Pontianak memiliki perusahaan yang bergerak di bidang perkebunan dan HTI, disamping perusahaan pengolahan kayu. Dengan demikian dapat diduga, walau pun perusahaannya tidak persis sama, pengusaha-pengusaha yang membuka usaha perkebunan dan HTI tentunya orang yang sama, yaitu para pengusaha HPH. Dari uraian ini terlihat bahwa dengan UUPA no. 5 th. 1960 telah terjadi pemindahan hak pemanfaatan hutan primer, dari masyarakat Dayak kepada para pemodal kuat dari kota.

E. TANAH ADAT DAN HPH

Pemetaan hutan untuk dijadikan konsesi HPH cenderung mengingkari keberadaan tanah adat. Peta-peta areal HPH yang, tentu saja, dibuat di Jakarta tampak disusun berdasarkan anggapan bahwa hutan Kalimantan adalah hutan tanpa penghuni, hutan tanpa tuan. Hal ini terbukti dari tercakupnya banyak kampung Dayak di dalam areal HPH, dan di dalam kontrak kerja wilayah kampung tersebut dianggap sebagai bagian dari wilayah konsesi



Gambar 3. Areal HPH PT X

perusahaan, sebagai hutan yang dapat dieksploitasi. Kampung-kampung Dayak dalam wilayah konsesi HPH itu sendiri cenderung dianggap sebagai pemukiman liar, kampung para penyerobot hutan, kampung musuh orang kehutanan.

Namun demikian pada prakteknya perusahaan-perusahaan HPH tidak mengusik keberadaan tanah adat masyarakat Dayak. Hal itu terjadi karena

tanah-tanah adat tersebut umumnya merupakan hutan muda yang tidak mengandung kayu-kayu yang berharga tinggi. Selain itu, masyarakat Dayak akan melawan dengan segala upaya untuk melindungi tanah milik mereka dari gangguan orang lain.

Dari segi kepentingan terhadap lahan, perusahaan HPH mempengaruhi perladangan lewat pemotongan akses para peladang terhadap hutan primer sebagai lahan cadangan mereka. Dengan beroperasinya perusahaan-perusahaan HPH maka para peladang--secara teoritis--tidak memiliki kesempatan untuk membuka hutan primer. Dengan demikian perladangan hanya dapat mereka lakukan pada tanah adat, hutan sekunder yang pernah mereka buka sebelumnya.

Secara teknis penyempitan kesempatan membuka ladang baru ini membawa konsekuensi berupa intensifikasi lahan ladang. Tanpa harus diperintah, para peladang akan memperpendek rotasi pembukaan ladang mereka. Akibat lanjutnya dapat dibayangkan, bahwa cepat atau lambat kesuburan ladang tersebut akan turun, dan para peladang pun mungkin perlu memberi input pupuk terhadap usaha pertanian mereka.

Sementara penduduk pedalaman Kalimantan Barat ada yang mencoba memetik keuntungan dari kehadiran usaha penebangan kayu di dekat kampung mereka. Bekas areal penebangan yang terletak di dekat jalan pengangkut kayu mereka usahakan untuk ladang. Diambilnya pohon-pohon berkayu keras oleh para penebang memperingan kerja mereka dalam membuka ladang, walaupun kelebihan ini diimbangi oleh kekurangan berupa mengerasnya sebagian permukaan tanah akibat dilindas traktor dan bulldoser. Gejala ini mengindikasikan bahwa perubahan status penguasaan tanah perwalian tidak mengurangi kesempatan para peladang dalam mencari lokasi baru di luar tanah adat mereka.

F. KERUSAKAN HUTAN

Intensifikasi pemakaian sumberdaya--hutan--di Kalimantan Barat tentunya bukan tanpa konsekuensi ekologis. Konsekuensi pertama adalah menyusutnya mutu hutan tropis. Baik perladangan maupun HPH keduanya telah berhasil membuat hutan tropis di wilayah tersebut menjadi bekas hutan tropis. Namun demikian, agaknya HPH lah yang memberikan sumbangan terbesar terhadap berlangsungnya penurunan mutu tersebut. Hal ini terjadi karena laju penebangan hutan oleh HPH bagaimanapun juga jauh lebih tinggi daripada perladangan.

Konsekuensi kedua adalah meluasnya padang ilalang. Pada skala kecil, ukuran bidang yang sempit, berubahnya hutan tropis setelah mengalami penebangan menjadi padang ilalang sebenarnya bukan masalah. Dalam waktu

satu atau dua tahun munculnya ilalang tersebut digantikan oleh tumbuhan perdu, yang akan mengubah hamparan ilalang tersebut menjadi semak belukar muda, untuk seterusnya berkembang menjadi hutan muda. Pada skala luas, puluhan hingga ratusan hektar, proses suksesi seperti di atas akan berjalan lebih lambat, karena transportasi alami benih-benih pohon dari hutan harus menempuh jarak yang lebih jauh dan lebih makan waktu.

Dari manakah padang ilalang ini berpangkal. Secara teknis praktek perladangan tidak akan memunculkan hamparan padang ilalang seperti yang diuraikan di atas, karena para peladang tidak pernah membuka ladang dalam satu bidang hamparan yang luas. Untuk menghindari kerugian akibat serangan hama, para peladang di Kalimantan Barat selalu membuka ladang dalam ukuran-ukuran kecil, antara 600 meter persegi sampai setengah hektar, yang terpisah-pisah letaknya diselingi seperti itu, pada tahun kedua setelah pembukaan ladang tersebut sudah diisi oleh belukar muda, bukan oleh ilalang.

Padang ilalang agaknya juga tidak bersumber dari perusahaan HPH, mengingat sistem kerja mereka memang tidak membuat suatu bidang hutan menjadi benar-benar gundul. Kemungkinan besar pada ilalang ini muncul dari kombinasi antara HPH dan perladangan, yaitu perladangan yang dipraktekan pada bekas-bekas areal HPH. Pada Areal tersebut, pola pembukaan ladang yang terpisah-pisah jarang dikembangkan oleh masyarakat. Hal itu terjadi karena umumnya mereka cenderung membuka ladang dalam hamparan yang bersambungan di sepanjang jalan pengangkutan kayu yang dibuat oleh perusahaan HPH.

Kemungkinan lain dari pangkal padang ilalang adalah penebangan hutan yang dilakukan secara liar. Menurut beberapa sumber, penebangan liar ini didalangi oleh pengusaha di kota, mereka mengupah orang untuk menebang hutan ataupun siap menampung kayu tebangan liar tersebut. Tanpa adanya kontrol dari Pemerintah, penebangan ini dijalankan membabi buta dengan cara tebang habis. Semua kayu yang laku dijual akan ditebang.

G. BEBERAPA CATATAN

Pembahasan di muka telah menguraikan bagaimana hutan di Kalimantan Barat berubah, baik secara sosial--dari segi kepemilikan--dan juga dari segi fisik. Secara ringkas dapat disampaikan bahwa apa yang sedang berlangsung di Kalimantan Barat saat ini adalah proses intensifikasi pemakaian sumberdaya. Dan "hukum lingkungan" menunjukkan bahwa intensifikasi selalu diikuti oleh penurunan mutu sumberdaya. Dari pembahasan tersebut dapat dilihat bahwa istilah perusak hutan yang sering dialamatkan kepada masyarakat Dayak, para peladang, adalah kurang tepat. Sebab bila--dewasa

ini--mereka benar merusak hutan dengan aktifitas perladangannya, hal itu tidak mereka lakukan sendiri. Lagi pula, justru karena ditekan oleh HPH--dan perusahaan ikutannya--lah perladangan di Kalimantan dapat memunculkan padang ilalang dan degradasi mutu lahan.

Secara tradisional masyarakat Dayak di Kalimantan Barat memanfaatkan lingkungan mereka pada tingkat yang amat rendah, mereka menumpang hidup pada hutan--bukan mengeksploitasinya habis-habisan. Reaksi masyarakat Dayak terhadap peristiwa yang terjadi di bekas tanah perwalian mereka adalah perasaan heran. Ketika mesin-mesin dan para pekerja dari kota berbondong memasuki rimba, mereka hanya bergumam heran betapa orang-orang kota yang berpendidikan ternyata tidak mengenal sopan santun sama sekali, memasuki tanah perwalian tanpa minta permissi kepada walinya, menebang hutan tanpa minta ijin kepada roh penunggunya. Selebihnya adalah keterkejutan dan ketidak mengertian, betapa hutan yang merupakan nyawa kehidupan manusia di bumi dibabat tanpa belas kasihan. Seorang petani di pedalaman berkomentar masgul betapa orang-orang kota bertindak kejam terhadap hutan; "Orangnya belum datang, tanah hutan sudah mereka bongkar-bongkar dengan mesin".

KEPUSTAKAAN

- Biro Pusat Statistik, 1989. *Statistik Indonesia*. Jakarta: Biro Pusat Statistik.
- Conklin, Harold C., 1975. *Hanunoo Agriculture: A Report on an Integral System of Shifting Cultivation in the Philippines*. Connecticut: Elliot's Books.
- Departemen Kehutanan, 1988. *Statistik Kehutanan Indonesia*. Jakarta: Departemen Kehutanan.
- Dove, Michael R., 1985a. *Swidden Agriculture in Indonesia: The Subsistence Strategies of The Kalimantan Kantu*. New York: New Babylon.
- _____, 1985b. "The Agro-ecological Mythology of The Javanese and The Political Economy of Indonesia" dalam *Indonesia* Vol. 39. April, 1985. Ithaca: Cornell University.
- _____, 1986. "Peasant versus Government Perception and Use of The Environment: A Case-Study of Banjarese Ecology and River Basin Development in South Kalimantan", dalam *Journal of Southeast Asian Studies*. Volume XVII Number 1. Singapore: Singapore University Press.
- Geertz, Clifford, 1983. *Involusi Pertanian: Proses Perubahan Ekologi di Indonesia*. Jakarta Yayasan Obor.

- Goeltenboth, Friedhelm, 1992. "Kerusakan Hutan dan Implikasi bagi Kesiambungan Daya Dukung lingkungan" dalam *Prisma* No. 6 Tahun XXI. Jakarta: LP3ES.
- Kay, F. Bahaudin Kay, 1988. *Beberapa Masalah Kepentingan Masyarakat Adat Yang Berhubungan dengan Tanah-tanah Adat*. Makalah pada Seminar Peranan Hukum Adat, 12 — 14 Desember, 1988. Pontianak: Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura.
- Kunstadter, Peter., E.C. Chapman., dan Sanga Sabhasari (ed), 1978. *Farmers in the Forest*. Honolulu: East West Center.
- Mubariq Ahmad, 1992. "Rente Ekonomi dalam Eksploitasi Hutan Tropis" dalam *Prisma* No. 6 Tahun XXI. Jakarta: LP3ES.
- Ngo, T.H.G. Mering, 1989. "Antara Pemilik dan Pemanfaat Kisah Penguasaan Lahan Orang Kayan di Kalimantan Barat". *Prisma*, 18(4): 73 — 86. Jakarta: LP3ES.
- _____, 1992. "Hak Ulayat Masyarakat Setempat: Pelajaran dari Orang Kayan dan Limbai" dalam *Prisma* No. 6 Tahun XXI. Jakarta: LP3ES.
- Sajise, Percy E., 1984. "Plant Succession and Agroecosystem Management", dalam A. Terry Rambo and Percy E. Sajise (ed.), *An Introduction to Human Ecology Research on Agricultural Systems in Southeast Asia*. Los Banos: University of the Philippines.
- Spencer, J.E., 1977. *Shifting Cultivation in Southeastern Asia*. California: University of California Press.